

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia selalu diawali oleh pemuda, lebih khususnya adalah mahasiswa. Mulai dari seratus tahun yang lalu dengan Kebangkitan Nasional Indonesia (1908) sampai dengan pergerakan mahasiswa yang telah melahirkan gerakan reformasi (1998) dengan mundurnya Presiden Suharto yang telah memimpin orde baru selama 36 tahun. Tidak heran mahasiswa dijuluki sebagai *agent of change*. Pergerakan mahasiswa yang senantiasa membawa perubahan berbangsa dan bernegara disebabkan oleh tampilnya mahasiswa sebagai warga yang tercerahkan¹ pada awal abad 20 membuat perubahan strategi perlawanan terhadap penjajah di berbagai wilayah kepulauan *Nederlandshindie*. Pada abad 17, 18, dan 19; penggunaan strategi otot; perlawanan bersifat fisik dan sporadis mengalami kegagalan dan kekalahan, perlawanan ini misalnya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, Pattimura, Pangeran Diponegoro, dan Sisingamangaradja. Awal abad 20 warga yang tercerahkan menciptakan strategi otak, yang dalam sejarah Indonesia disebut periode pergerakan nasional. Senjata otak ini dimulai dengan organisasi, media massa, dan dialog.

Dari segi sosial, warga yang tercerahkan diawali dengan adanya perjuangan atas perlakuan yang berbeda antara anak-anak bangsawan yang sekolah di *Boofdenschool* (sekolah khusus bangsawan dan priyayi) yang pada abad ke-20 menjadi OSVIA; dan sekolah kejuruan seperti sekolah guru (*Kweekscjool*) dan sekolah dokter Jawa (STOVIA)². Menurut Burhan D, Magenda³, selain sebagai politik etis, tujuan pendirian pendidikan tinggi ialah memperoleh tenaga kerja menengah lokal. Situasi ini (1902) yang melahirkan istilah bangsawan berpikir, sebagai perlawanan dari istilah bangsawan usul, yang diwujudkan dalam perjuangan Budi Utomo. Setelah itu pikiran menjadi dasar bagi perjuangan; dasar yang sepenuhnya berpegang pada kaum terpelajar atau pemuda

¹ Anhar Gonggong, 2007: 17

² Yudi Latif, 2008: 194

³ Burhan D, Magenda, 1977:3

terpelajar yang mendapatkan pendidikannya di perguruan tinggi (PT)⁴. PT tidak hanya menghasilkan orang-orang berilmu pengetahuan tinggi tetapi juga menghasilkan orang-orang yang intelektual. Telah dicatat bahwa kegiatannya dapat menggoncangkan dunia karena sifat mahasiswa yang dinamis, militan, kreatif, jujur, berani, dan tanpa pamrih⁵. Sehingga pergerakan mahasiswa tidak pernah terlepas dari nasionalisme dan perubahan sosial. Pendidikan bagi orang terjajah ini mengandung benih-benih kontradiksi dan menjadi sumber munculnya tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Mahasiswa-mahasiswa pribumi merasakan adanya *noblesse oblige* untuk memperjuangkan nasib rakyat yang tertindas.

Tantangan pergerakan nasional ialah menghadapi kekuatan kekuasaan pemerintah Kolonial Kerajaan Belanda dan membangun rumusan persatuan di atas landasan paham kebangsaan atau nasionalisme yang dapat diterima oleh seluruh etnik yang berada di wilayah negeri terjajah. Sebagai realisasinya, Budi Utomo dibentuk oleh mahasiswa STOVIA, organisasi yang membangun tabiat yang luhur dan utama. Demikian selanjutnya Gerakan Budi Utomo yang berdiri tahun 1908 dijadikan sebagai momentum tonggak kebangkitan bangsa Indonesia sehingga disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Pergerakan mahasiswa tidak berhenti di sini, gerakan ini merumuskan visi bangsa Indonesia ke depan sebagai negara kesatuan, yang kemudian direalisasikan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan pada puncaknya ialah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sejarah Indonesia modern telah menunjukkan bahwa generasi muda hampir selalu tampil sebagai penentu perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan bangsa. George McTurnan Kahin⁶ bahkan menggunakan penamaan “revolusi kaum muda” untuk menyebutkan pergerakan tokoh-tokoh yang memelopori terjadinya perubahan yang melahirkan bangsa dan negara Indonesia modern. Perjuangan intelektual ini umumnya berupa upaya untuk merobohkan kekuasaan rezim otoriter dan kediktatoran yang membawa bangsa jatuh pada kondisi kritis yang dapat membawa kehancuran. Tidak terkecuali di Indonesia, pergerakan mahasiswa menentang penjajahan dan kediktatoran mulai pergerakan kemerdekaan sampai dengan pergerakan mahasiswa yang melahirkan

⁴ Sarlito, 1978 : 39-40

⁵ Yasmindo, 1975: 302

⁶ lihat Hatta Albanik. 2004:3

reformasi. Pergerakan mahasiswa selalu dimulai dengan forum diskusi ilmiah di kampus-kampus sebagai ciri kaum intelektual. Hal ini dijelaskan oleh Pangestu⁷ bahwa pergerakan mahasiswa selalu dimulai dari forum diskusi oleh sekelompok kecil mahasiswa idealis, yang mencoba membangkitkan kesadaran subyektif. Hal ini dapat dilihat dari sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia, sebagai berikut:

1) Pergerakan Mahasiswa Era Pergerakan Nasional (1908-1928)

Pergerakan nasional 1908 ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, yang dilatarbelakangi oleh hadirnya lembaga pendidikan yang merupakan kebijakan Belanda “hutang budi”, sebuah politik etis yang merumuskan tiga pokok, yaitu *education*, *emigratie*, dan *irrigatie*. Terkait dengan bidang pertama, Pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah, yaitu sekolah angka satu⁸ untuk siswa golongan atas dan sekolah angka dua untuk sisa golongan bawah. Lulusan sekolah angka satu dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu MULO, AMS, dan ke pendidikan tinggi yaitu OSVIA atau STOVIA, dan ada beberapa mahasiswa yang berkesempatan melanjutkan studi ke Eropa, yaitu HBS (*hooger Burger School*). Dari sekolah ini, lahirlah lapisan elit baru yaitu terpelajar yang menjadi cikal bakal perlawanan kaum muda yang juga memanfaatkan jaringan di seluruh dunia.

Semangat revolusioner muncul ketika mengetahui kemenangan Jepang atas Rusia (1905) yang membuktikan bahwa bangsa Asia juga mempunyai kekuatan tidak kalah dengan bangsa Eropa. Ada lima karakteristik pergerakan nasional saat ini⁹, yaitu: *pertama*; keinginan mewujudkan Indonesia merdeka, *kedua*; bereksperimen dengan berbagai ideologi misalnya reformis Islam (Natsir), nasionalis (Sukarno) komunis (Tan Makala) sosialis (Hatta dan Syahrir), *ketiga*; lebih radikalisme daripada kooperatif, *keempat*: kooperatif terhadap perbedaan ideologi jika memiliki tujuan yang sama, *kelima*; memiliki cetak biru Indonesia masa depan.

⁷ Dalam Didik Sipriyanto, 1998: 22

⁸ Pada tahun 1914 diubah menjadi HIS (Hollandsch Inlandsche Scolen). Pendidikan lanjutannya adalah MULO (Meer Uitgebreid Langer Onderwijs) setingkat SMP dan disusul AMS (Algemeene Middelbare Scholl) setingkat SMA.

⁹ Muhamad Agus Syadat Hasibuan, 2008: 25

Budi Utomo didirikan pada Rabu, 20 Mei 1908 di gedung STOVIA, dan mendapat respon dari priyayi Jawa, tetapi, orientasi Budi Utomo beralih pada kepentingan priyayi Jawa bukan rakyat jelata sehingga pemuda-pemuda yang tidak puas, diantaranya Kadarman, Sunardi, Satiman mendirikan perkumpulan Tri Koro Dharmo, pada 7 Maret 1915, yang kemudian pada kongresnya di Solo (12 Juni 1918) berganti menjadi Jong Java. Jong Java bukan organisasi politik tetapi pada kongres VII 1924 diputuskan bahwa anggota yang telah dewasa diberi kebebasan berpolitik. Organisasi berbasis etnis ini diikuti oleh Haji Agus Salim mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB), kemudian menerbitkan majalah “Al Noer”, Muhamad Hatta, Muhamad Yamin, Nazir Datuk Pamuntjak; mendirikan Jong Sumatranen Bond (JSB), pada 9 Desember 1917. Nazir, pada 17 Januari 1918 memperkenalkan JSB, dengan dukungan dari Mohammad Taher Marah Sultan, diselenggarakan rapat-rapat di Padang. JSB mendapat dukungan luas di daerah asalnya dan pada bulan Juni 1919 JSB mengadakan Kongres I dan memutuskan ketua: Amir, sekretaris: Bahder Djohan, bendahara: Mohamad Yamin. Pada Lustrum I, tahun 1923 Yamin menggagas untuk mengganti bahasa pengantar, Belanda dengan bahasa Indonesia tetapi ditolak karena khawatir Belanda mempersulit JSB. Pada awalnya organisasi pemuda itu berorientasi pada budaya lokal, seperti juga Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, Pasundan. Namun, benih-benih persatuan Indonesia menjadi ciri mereka, yang kemudian para pemuda merasa perlu mendirikan wadah yang lebih besar.

Pada 30 April hingga 2 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda I di Jakarta yang diketuai oleh M. Tabrani, kongres bertujuan mempererat hubungan perkumpulan-perkumpulan pemuda. Dalam kongres tersebut, yang paling prinsip dibicarakan ialah penetapan bahasa persatuan, antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu; serta adanya keinginan untuk menggabungkan perkumpulan pemuda. Pada konferensi 15 Agustus 1926 oleh Jong Java, JSB, Sekar Rukun, JIB. JIB, Ambonsche Studeerenden, Minahasasische Studeerenden, dan Kongres Komite mengusulkan mendirikan badan permanen untuk Persatuan Indonesia, usul diterima, terkecuali oleh JIB. Badan baru ini bernama Jong Indonesia disyahkan pada 31 Agustus 1926. Di Bandung, juga didirikan Pemuda Indonesia pada Desember 1927.

Pada 27-28 Oktober 1928, diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta bertujuan menyatukan segala perkumpulan pemuda. Muhammad Yamin dalam pidatonya di hadapan 750 orang peserta menyatakan “Dengan sumpah ini, organisasi pemuda ramai-ramai menanggalkan watak kedaerahan mereka dan melebur menjadi satu organisasi: Indonesia Muda”. Kongres ini menghasilkan: Pertama, Sumpah Pemuda yang berisikan tiga sendi persatuan Indonesia; yaitu tanah air; bangsa; dan bahasa; teks Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Kedua, diperkenalkan lagu *Indonesia Raya* ciptaan Wage Rudolf Soepratman; Ketiga, bendera merah putih. Keberhasilan yang dicapai dalam waktu dua tahun ini (1926-1928), memotivasi pelajar Belanda pulang ke tanah air, di antaranya ialah Nazir, Monohutu, Sartono. Dalam kurun waktu dua tahun itu juga pemuda-pemuda yang tinggal di Gedung *Indonesisch Clubge Berouw* di Jalan Kramat Raya 106, mengadakan pertemuan intensif. Pada 24-28 Desember 1928 dihasilkan putusan fusi, kemudian pada 31 Desember 1928 dalam konferensi di Solo berdirilah Indonesia Muda, dengan 2.400 anggota dan 25 cabang; dan menerbitkan majalah bernama Indonesia Muda.

Pergerakan nasional mulai memasuki tahap radikal, pada tahun 1926 di Banten dan Sumatera Barat meletus pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), tapi dengan mudah ditindak oleh Pemerintah Kolonial, akibatnya ribuan orang dikirim ke Boven Digul¹⁰. Belanda menjadi semakin sensitif terhadap pergerakan nasional. Tetapi, justru pemuda Indonesia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Sukarno. PNI kemudian mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok, antara lain Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Budi Utomo, Pasundan, Soematraneen Bond, Kaum Betawi, Kelompok Studi Indonesia (KSI), Kelompok Studi Umum (KSU). Pada 17-18 Agustus 1927 di Bandung pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan federasi yaitu Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Usai Perang Dunia I (1914-1918), semangat antikolonialisme membuat demam dunia, yang muncul melalui berbagai bentuk perjuangan seperti gerakan non-kooperatif, gerakan *swaraaj* (kemerdekaan), dan gerakan *swadeshi* (kemandirian) di India, emansipasi politik, dan sebagainya. Selain itu, tumbuh

¹⁰ Kegagalan pemberontakan yang diilhami oleh PKI 1926-1927 dipakai alasan pemerintah Hindia Belanda untuk menangkap banyak pemuda-pemuda gerakan kebangsaan dari kalangan agama Islam dan nasionalis, kemudaiian diasingkan di Digul (Purbo S. Sowondo, 1999: 5)

lembaga-lembaga internasional yang mendasarkan diri pada kehormatan kebangsaan, seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa. Di kawasan Hindia Belanda, khususnya mulai direalisasi Dewan Rakyat.

Situasi ini membuat banyak aktivis pergerakan dan perjuangan kemerdekaan merasa di atas angin. Juga mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Awalnya aktivitas mereka berpusat pada kelompok belajar dan diskusi, kemudian mendirikan *Indische Vereeniging* pada tahun 1908. Tetapi, warna pergerakan berubah menjadi radikal, lebih-lebih setelah masuknya beberapa anggota baru, yaitu sejumlah tokoh *Indische Partij* dari Indonesia yang dibuang ke Belanda oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1913. Ketua *Indische Vereeniging* menyatakan tiga perjuangan adalah Indonesia menentukan nasib sendiri, kemampuan dan kekuatan sendiri, serta persatuan dalam menghadapi Belanda. Dalam perkembangannya, *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* atau Perhimpunan Indonesia (PI), yang berpusat di Negeri Belanda, didirikan tahun 1915. PI tegas menyatakan bahwa perjuangannya bukan lagi bersifat sosial tetapi sudah menjadi perhimpunan politik, dengan tujuan utama Indonesia Merdeka.

Perjuangan ini semakin menguat, terlebih dengan adanya seruan Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, tentang penentuan nasib sendiri, PI mulai menentang kolonialisme dan imperialisme. Realisasinya bukan hanya berubah dari *Indische Vereeniging*, tetapi juga menerbitkan majalah *Hindia Putra*. Dalam satu tulisannya, PI menempatkan kemerdekaan Indonesia dengan empat pokok utama yaitu kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperatif, dan kemerdekaan. Jiwa nasionalisme ini semakin memuncak tatkala pemuda Indonesia datang ke Belanda yaitu Subardjo (1919) dan Muhammad Hatta (1921), ketika itu, umur mereka sekitar 22 tahun dan 19 tahun. Anak muda ini mengalami keterasingan budaya tetapi justru membentuk sikap bahwa mereka sederajat dengan bangsa Eropa.

Pengaruh PI meluas ke Indonesia, ketika serombongan mahasiswa yang bergabung dalam PI kembali ke tanah air, kemudian PI menyelenggarakan kursus kebangsaan dan diikuti oleh perkumpulan lainnya. Lahirnya kelompok studi¹¹, yang dilatarbelakangi oleh: *pertama*, pemuda tidak bisa menyesuaikan diri dan kecewa pada partai politik yang ada; *kedua*, kelompok studi bisa menjadi media

¹¹ Muhamad Agus Syadat Hasibuan, 2008: 38

alternatif ketika pemerintah bersikap refresif; *ketiga*, tidak dibatasi sekat-sekat kedaerahan. Beberapa kelompok studi tersebut antara lain: *Pertama*, KSI di Surabaya yang berdiri 29 November 1924 oleh Soetomo, dokter mantan aktivis PI. *Kedua*, KSU, berdiri 15 November 1925, yang dibidani oleh Ishaq Cokroasudisuryo yang dilaksanakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Bandung (sekarang ITB), di antaranya adalah Sukarno, kelompok ini menerbitkan majalah *Indonesia Moeda*, pada edisi pertamanya, Sukarno menulis artikel berjudul *Nasionalisme, Islam, dan Marxisme*; yang intinya, tiga aliran tersebut ada pada ranah yang sama yaitu hasrat kebangsaan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme barat. *Ketiga*, menjelang tahun 1930, jumlah kelompok studi semakin banyak, di antaranya St Bellarmius didukung oleh mahasiswa Khatolik, *Cristelijke Studenten Vereeging* (CSV), perkumpulan mahasiswa Protestan, dan Student Islamische Study Club (SIS); tokoh yang berpengaruh adalah Dr. J Leimena (CSV), Mohammad Roem dan Jusuf Wibisono (SIS).

Selain berkonsolidasi dengan perkumpulan pemuda di Indonesia, PI juga berhubungan dengan tokoh-tokoh pemuda internasional, khususnya dengan negara jajahan di Asia dan Afrika. Hal ini dilakukan agar masalah Indonesia mendapat sorotan internasional, bahkan Mohammad Hatta pada Kongres VI Liga Democratie di Paris, pada Agustus 1926 menyatakan kemerdekaan Indonesia¹². Hatta juga menghadiri Kongres Internasional Menentang Kolonialisme di Brussel, Belgia di Berlin, akhirnya kongres menuntut Belanda untuk memberikan kebebasan bekerja pada pergerakan rakyat Indonesia. Aktivitas PI merupakan ancaman sehingga Belanda menangkap empat anggota PI pada 10 Juni 1922, yaitu Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Abdulmajid Djojodiningrat, dan Ali sastroamidjojo; atas tuduhan menghasut di muka umum. Namun dalam pengadilan di Den Haag, 22 Maret 1928 mereka dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.

Dalam salah satu edisi *Indonesia Merdeka* (dulunya *Hindia Putra*) terdapat esai yang kemudian disebut dengan Manifesto 1925 yang isinya mengenai ketegasan sikap, yaitu: *Pertama*, rakyat Indonesia sewajarnya

¹² Kata Indonesia, yang diberikan oleh etnolog Inggris: James Richard son Logan tahun 1850 dalam *Journal of the Indian Archipelego and East India*. Awalnya Indonesia merupakan istilah geografi untuk sebutan “dunia pulau” di selatan Benua Asia kemudian menjadi kata yang beruatan politis. Sejak itu Indonesia sebagai nama calon suatu negara menjadi dikenal di dunia.

diperintah oleh pemerintahan yang dipilih oleh mereka sendiri. *Kedua*, dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun. *Ketiga*, tanpa persatuan kukuh dari pelbagai unsur rakyat tujuan perjuangan itu sulit dicapai. Manifesto 1925 menyemangati lahirnya Sumpah Pemuda, bahkan menurut Sartono Kartodidjo¹³ Manifesto 1925 lebih penting daripada Sumpah Pemuda karena di dalamnya terdapat tiga prinsip dasar yaitu *unity* (persatuan), *fraternity* (kesetaraan), dan *liberty* (kemerdekaan); terilhami dari semangat revolusi Perancis *liberte, egalite, fraternite*.

2) Pergerakan Mahasiswa Era Kemerdekaan Indonesia (Angkatan 45)

Pemerintah kolonial semakin refresif, tapi justru semangat ke-Indonesiaan tambah kuat. Jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang 8 Maret 1942 dijadikan alasan kaum republikan mengusir Belanda. Pendudukan Jepang, menurut Donald Wilhem¹⁴ dalam bukunya *Indonesia Bangkit*, memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga Jepang menempatkan orang-orang Indonesia pada jabatan strategis untuk menarik simpati, juga membentuk organisasi yaitu Masyumi (gabungan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Islam Indonesia) Pusat Tenaga Rakyat (Putra), Heiho (pasukan pembantu), Pembela Tanah Air (PETA)¹⁵, Korp Pemuda Semi-Militer Seinendan. Larangan penggunaan bahasa Belanda, memotivasi penggunaan Bahasa Indonesia sehingga nasionalis semakin menebal.

Kemudian 7 September 1944 pada sidang Teikoku Gikai (Parlemen Jepang) diumumkan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) diperkenankan merdeka. Menanggapi hal ini, pemuda dan golongan yang sadar politik menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Jepang; tetapi terdapat pula golongan politik lain yang bergerak “di bawah tanah” yang tidak setuju dengan tawaran Jepang ini. Jatuhnya Daipon, dan dipukul mundurnya angkatan perang Jepang dari Irian Timur, Kepulauan Solomon dan Marshall oleh angkatan perang Sekutu,

¹³ Tempo. 2008. Edisi Khusus 80 Tahun Sumpah Pemuda: 28

¹⁴ Lihat Muhamad Agus Syadat Hasibuan, 2008: 46 dan Suharsih, 2007: 59

¹⁵ Para pemuda di Jakarta menyadari akan potensi PETA sehingga mengusulkan kepada Bung Karno agar PETA dinyatakan sebagai inti suatu tentara nasional, tetapi PETA justru dibubarkan, setelah Indonesia merdeka, pada 19 Agustus 1945, kemudian 23 Agustus 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sebagian besar anggotanya adalah ex-PETA, BKR kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). (Purbo S. Sowondo, 1999:7)

maka seluruh pertahanan Jepang di Pasifik terancam. Sementara itu Jepang menghadapi serangan Amerika atas kota Ambon, Makasar, Manado, Surabaya, dan Balikpapan. Di bawah ancaman tersebut, Jepang di bawah Saiko Syikikan Kumakici Harada (di Jawa), 1 Maret 1945 mengumumkan BPUPKI (sesuai janji Koiso), yang diketuai oleh Dr. K R T Rajiman Widyodiningrat. Pengangkatan Rajiman disetujui Ir. Sukarno, karena Sukarno menganggap kedudukannya sebagai anggota akan lebih leluasa bergerak.

Tanggal 28 Mei 1945 dimulai sidang I di gedung Cuo Sangi In. Pada saat itu dikibarkan bendera Hinomaru oleh Mrs A.G. Pringgodigdo, disusul dengan pengkibaran Sang Saka Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. BPUPKI terdiri atas dua bagian; *pertama*, bagian Perundingan yang diketuai oleh Rajiman; *kedua*, bagian Tata Usaha diketuai oleh R. P. Suroso dan wakilnya Mr. A.G. Pringgodigdo. Sepanjang hidupnya, badan ini bersidang dua kali, yaitu: pertama, 29 -1 Juni 1945 menetapkan Dasar Negara Pancasila; kedua, 10 -16 Juli 1945 menetapkan Rancangan UUD 1945.

Pada sidang 1, diadakan pembicaraan tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka, Ir Sukarno menegaskan dalam pidatonya, akan pentingnya persatuan, baik saat perjuangan maupun saat Negara Indonesia Merdeka. Ditegaskan pula bahwa “Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mencapai tujuan bangsa. Kita tidak usah menunggu sampai orang pandai cukup banyak, tak usah pula kita menunggu sampai alat-alat yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara tersedia lengkap; tetapi kemerdekaan politik itulah harus lebih dahulu kita peroleh! Lainnya dikejar sesudah kemerdekaan politik tercapai.”

Dasar negara, yakni dasar untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka, haruslah kokoh kuat sehingga tak mudah digoyahkan. Bahwa dasar negara itu hendaknya “jiwa, pikiran-pikiran yang sedalam-dalamnya, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar negara Indonesia hendaknya mencerminkan kepribadian Indonesia dengan sifat-sifat yang mutlak keIndonesiaannya dan sekalian itu dapat pula mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, aliran, dan golongan penduduk. Berdasarkan pikiran tersebut, Ir Sukarno mengemukakan dan sekaligus mengusulkan lima prinsip (asas) yang sebaik-baiknya dijadikan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu: kebangsaan Indonesia, internasionalisasi

atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan, yang kemudian dikenal dengan Pancasila.

Menjelang kemerdekaan RI, pelajar dan mahasiswa berperan dalam yang disebut dengan Peristiwa Rengasdengklok, yaitu gerakan “penculikan” Sukarno dan Hatta oleh sejumlah pemuda, di antaranya adalah Adam Malik, Chaerul Saleh pada 16 Agustus 1945 untuk diamankan di Rengasdengklok untuk kemudian didesak untuk mempercepat pengucapan proklamasi. Sementara itu, di Jakarta Chairul Saleh dan kawan-kawan berencana merebut kekuasaan tetapi sebagian anggota PETA tidak setuju. Rencananya, Proklamasi akan dibacakan di Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 di kediaman Djiaw Kie Siong. Naskah proklamasi telah ditulis di rumah itu, bendera Merah Putih sudah dikibarkan, ada keyakinan bahwa 16 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Karena tidak ada berita dari Jakarta, Jusuf Kunto diutus untuk berunding dengan pemuda di Jakarta, namun yang ditemui hanya Mr. Achmad Soebardjo. Kemudian, keduanya kembali ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur pada 16 Agustus 1945. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis oleh Sayuti Melik dibacakan oleh Sukarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak itu, secara *de facto* NKRI resmi menjadi negara walaupun masih harus berjuang dalam diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional.

Pemuda, pelajar, mahasiswa yang ikut terlibat dalam perjuangan bersenjata, terorganisasi dalam Barisan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Mereka ikut dalam pertempuran berdarah di Kota Malang yang menewaskan 34 orang pelajar. Para pemuda juga ikut bergerak di bidang politik, pada 9-11 November 1945 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia IV. Pada saat itu, terjadi perubahan penggunaan nama lebih memilih berbau militer, misalnya Angkatan Pemuda Indonesia, Angkatan RI, Angkatan Muda Jawatan Gas dan Listrik, Angkatan Muda Indonesia Surabaya, Angkatan Pemuda RI Andalas Barat, Angkatan Kantor Pusat RI, Ikatan Pelajar Indonesia, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Jawatan Kereta Api, Angkatan Muda Indonesia Kalimantan.

Kongres yang diliputi suasana perjuangan itu dibuka oleh Presiden RI, Sukarno. Seorang delegasi dari Surabaya membawa ultimatum dari Mayor Jenderal Mandergh yang akan mengempur Surabaya, hal ini menimbulkan kemarahan peserta kongres. Hasil kongres ialah membentuk organisasi pemuda yang diberi nama Badan Kongres Pemuda RI (BKPRI), tujuh organisasi pemuda berazas sosialis melebur menjadi Pesindo. Pesindo berpikir bagaimana caranya merebut senjata yang masih berada di tangan Jepang dan menurunkan bendera Jepang, Hinomaru, digantikan Merah Putih. Kongres Pemuda V, 8-9 Juni 1946 di Yogyakarta, mengharapkan pemerintah RI bersikap tegas terhadap Belanda dan menghendaki kemerdekaan RI 100%. Dalam Kongres VI di Madiun pada 305 April 1945, dilaksanakan setelah Perjanjian Renville¹⁶, terlihat BKPRI pecah. Pada Kongres VII di Surabaya, 8-15 Juni 1950, ada usaha menyatukan kembali organisasi pemuda. Kongres dihadiri oleh 47 organisasi peserta dan 25 organisasi peninjau. Kongres ini berhasil membentuk Front Pemuda Indonesia (FPI), namun organisasi baru ini tidak banyak bekerja.

Awal tahun 1950 atau di masa demokrasi liberal, terjadi kemunduran dalam pergerakan mahasiswa dalam perpolitikan, sehingga ada slogan “buku, pesta, dan cinta”¹⁷. Bahkan mahasiswa menjadi *underbouw* partai-partai yang mencari massa untuk Pemilu 1955. Dan pada Pemilu 1955 sebagai Pemilu demokratis pertama di Indonesia, menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI dengan masing-masing kursi 57, 57, 35, dan 257. Dalam masa ini, muncul pemberontakan di daerah, misalnya Darul Islam.

3) Pergerakan Mahasiswa Era Orde Lama (Angkatan 66)

Pada awal kemerdekaan pergerakan mahasiswa memasuki ranah politik. Pemuda (angkatan 45) terpecah, pada posisi kekuasaan, dan tersingkir, serta ada yang oposisi yaitu dari Angkatan Darat yang anti-Sukarno dan tokoh partai yang dilarang setelah pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada 1 September 1945 para pemuda yang telah berjasa membentuk

¹⁶ Perjanjian tentang gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 (Kahin, 1995:289)

¹⁷ Slogan ini dicetuskan oleh Hasan Rangkuti, sebagai tandingan, muncul slogan baru yaitu ISODOPAN yang dicetuskan oleh Ali Mas'Ud yang merupakan singkatan dari ibadah, olahraga, studi, organisasi, demonstrasi, dan pacaran.

organisasi-organisasi, yaitu Angkatan Muda Indonesia (API) dengan tujuan memperteguh NKRI berdasarkan kedaulatan rakyat. API oleh Chaerul Saleh, D.N. Aidit, Darwis, A.M. Hanafi, Kusnandar, Djohar Nur, dan Khalid Rasjidi, mereka datang dari elemen buruh, tani, kaum miskin, intelektual, dan sebagainya. Organisasi lain, misalnya Barisan Buruh Indonesia (BBI), Barisan Rakyat (Bara), dan Seniman Indonesia Muda (SIM). Pada perkembangannya, organisasi pemuda ini mengangkat senjata, menolak penjajahan.

Pada 5 September 1945 dibentuk kabinet presidensial dengan dipimpin Sukarno beranggotakan kalangan partai, feodal, dan borjuis yang dapat menjauhkannya dari tuntutan rakyat. Sebulan setelah kemerdekaan, masih banyak rakyat Indonesia yang belum tahu, juga di Jakarta; pemuda lagi-lagi berperan untuk mensosialisasikan kemerdekaan ke seluruh Indonesia dengan mengadakan rapat besar (19 September 1945) di lapangan IKADA (Ikatan Atletik Jakarta); peristiwa ini merupakan prestasi yang sangat besar.

Pada bulan November 1945 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Pemuda yang menggabungkan 28 organisasi pemuda, tetapi kongres hanya melahirkan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) hasil fusi 7 organisasi dan sebuah federasi bernama Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI). Pesindo bertujuan menciptakan situasi revolusioner melawan kekuatan asing dan membangun masyarakat yang berkeadilan sosial, sedangkan BKPRI bertujuan mengorganisasi kekuatan militer di luar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan mengatur kegiatan politik. Tahun 1947 berdiri beberapa organisasi mahasiswa dengan latar belakang ideologi, agama, profesi, dan komunitas. Misalnya HMI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Contrestasi Gerakan Mahasiswa Indoensia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan (PMKH), Perhimpunan Mahasiswa Jakarta (PMJ), Dewan Mahasiswa (DM). Sejak tahun 1957, TNI bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut untuk menyelamatkannya dari PKI dengan mendirikan Badan Kerja Sama (BKS) dan mengukuhkan Badan Kerja Pemuda Militer (BKSPM)¹⁸. BKS juga merupakan kerja sama dengan buruh, petani,

¹⁸ Di sinilah dimulai babak intervensi militer pada organisasi pemuda dan mahasiswa dalam Suharsih dan Ign Mahendra, 2007: 71

wanita, dan elemen lainnya; yang kemudian bergabung Front Nasional melalui PP nomor 13 tahun 1959.

Di sinilah dimulai babak intervensi militer pada organisasi pemuda dan mahasiswa. Pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) oleh golongan karya/fungsional dari Front Nasional, pada akhirnya untuk menandingi Front Nasional yang didominasi oleh PKI. Salah satunya dengan mendirikan Resimen Mahasiswa (Menwa) untuk mengimbangi CGMI (PKI). Tahun 1960-an, mahasiswa dihadapkan pada dua kekuatan besar intelektual, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan universitas barat (Amerika). Lekra yang bergerak di bidang seni dan sastra, menolak segala bentuk budaya barat. Lekra diimbangi oleh Manifestasi Kebudayaan (Manikebu) dipimpin oleh Soedjatmoko dan Rosihan Anwar, menuntut keterbukaan atau pro-barat.

Kebangkitan kampus dimulai pada periode demokrasi terpimpin, radikalisme di kalangan mahasiswa di pertengahan tahun 1966 dan adanya peristiwa di akhir tahun 1965 yang membawa perubahan mendasar pada perpolitikan Indonesia dengan munculnya mahasiswa di ranah politik; yang diiringi oleh makin kuatnya militer karena militer berambisi dalam kekuasaan karena ada anggapan bahwa sipil lemah. Di lain pihak, antara tahun 1950 sampai tahun 1960, jumlah mahasiswa meledak; tahun 1946 jumlah mahasiswa 387, tahun 1960 mencapai 200.000 mahasiswa¹⁹. Pertambahan jumlah mahasiswa ini dinilai positif oleh partai politik untuk menarik partisipasi politik dari kalangan muda, akibatnya, mahasiswa terkotak-kotak dalam ideologi, dan cenderung membentuk organisasi kemahasiswaan yang menyokong partai; misalnya GMNI (PNI), CGMI (PKI), PMII (NU), SEMMI (PSII), MMI (Masyumi).

Tetapi Sukarno lebih memihak pada organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi pada PKI, hal ini membuat organisasi lain tersingkir lalu membuat tandingan dengan mendirikan Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan tokoh-tokohnya antara lain, David Napitupulu, Cosmas Batubara, Zamroni, Firdaus Wardji, dan Liem Bian Khoen. KAMI didukung oleh militer, khususnya, antara lain Brigjen Sukendro, Jenderal Nasution, Jenderal Darsono, Kemal Idris, Sarwo Edhi. Menjelang jatuhnya Sukarno (1960-an), mahasiswa Peristiwa G30S PKI, 1965, dengan dibunuhnya tujuh jenderal dan seorang perwira pertama,

¹⁹ Suwondo, 2002: 99

dianggap sangat sadis, maka mahasiswa protes atas kejadian tersebut, aksi juga dilakukan oleh partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas). Tuntutan pembubaran PKI dan penurunan harga bahan pokok, mendapat sambutan masyarakat luas. Gerakan mahasiswa ini masih bersifat lokal sehingga pengaruhnya tidak begitu besar, malahan Sukarno semakin kokoh setelah mendapatkan dukungan dari ormas dan orpol yang telah dijinakkannya, sementara harga kebutuhan pokok semakin menggila.

Melihat kondisi di atas, 10 Januari 1966 ribuan mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengumandangkan “Tritura” (tiga tuntutan rakyat) yaitu turunkan harga, bubarkan PKI, dan bersihkan kabinet dari orang-orang PKI; aksi ini mendapat simpati dari kalangan bawah. Aksi Tritura ini, menurut Sukarno ditunggangi oleh CIA tetapi Suharto justru mendukung aksi ini, dengan ucapan “Jaga anak-anak muda ini (mahasiswa) jangan sampai mereka jadi korban. Gerakan mereka adalah gerakan kita juga”²⁰. Puncak aksi ini adalah saat Presiden Sukarno mengumumkan perubahan anggota kabinet, namun mahasiswa dan Suharto menolak.

Pada 24 Februari 1966 terjadi aksi besar-besaran yang juga didukung oleh Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI), dan seorang mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim tertembak oleh anggota Cakrabirawa. Gugurnya mahasiswa ini menjadi titik tolak bagi perbesaran pergerakan mahasiswa, pemakaman mahasiswa tersebut mendapat sambutan dari berbagai kalangan seperti Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Resimen Parakomando Angkatan Darat (RPKAD), Kodam Jaya, dan Kodam Siliwangi. KAMI semakin kuat karena militer ada di belakang mahasiswa, justru Sukarno membubarkan KAMI melalui Kepres Nomor 41/Komando Gabungan 26 Februari 1966 dan menangkap tokoh-tokohnya. Mahasiswa atas dukungan militer, justru membentuk Resimen Arief Rahman Hakim, terdiri atas 7 batalyon dari sekitar 42 universitas.

Keadaan semakin genting, Suharto mengirim pejabat militernya menghadap Presiden Sukarno, agar merombak kabinet; pada 6 Maret 1966 Suharto menemui Sukarno dan mengancam tidak bertanggung jawab atas kondisi keamanan jika Sukarno tidak mengindahkan permintaannya. Kemudian, Suharto

²⁰ Muridan, 1999:30

memerintahkannya Jenderal Amir Mahmud, M Yusuf, dan Basuki Rahmat ke Bogor. Hasil diskusi dengan Presiden, keluarlah “Surat 11 Maret”, yang menyatakan bahwa “memerintahkannya” kepada Suharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengamankan negara dan menjaga keamanan demi kelangsungan revolusi, dan juga menjamin keamanan presiden demi kesatuan Indonesia. Melalui surat yang dikenal dengan nama Supersemar itu, Suharto secara *de facto* memegang kekuasaan di Indonesia.

Sebagai “hadiah” atas perannya dalam membantu Suharto memperoleh kekuasaan, mahasiswa diberi peran politik sebagai anggota parlemen, yaitu Fahmi Idris, Johny Simanjuntak, David Napitupulu, Mari’e Muhamad, Liem Bian Koen, Soegeng Sarjadi, Nono Anwar Makarim, Yozar Anwar, Cosmas Batubara, dan Slamet Sukirnantoro. Penempatan mahasiswa dalam parlemen ini ditolak (mosi) oleh KAMI berdasarkan keputusan Pleno Presidium KAMI Pusat (16 Januari 1968), Rahman Tolleng sebagai ketua KAMI memimpin delegasi menemui Suharto untuk menyatakan mosi. Tetapi, melalui perombakan kabinet, Rahman Tolleng menjadi anggota parlemen di Fraksi Karya yang dibentuk oleh Mashuri (Dirjen PT). Sidang MPRS 1968 memutuskan Suharto sebagai presiden RI, dan membentuk Kabinet Ahli (salah satunya Prof. Soemitro Djojohadikusumo) disambut gembira oleh KAMI.

Ada kekhawatiran terhadap keberadaan mahasiswa di parlemen karena mereka tidak menyuarakan suara mahasiswa. Hal ini dinyatakan oleh Soe Hok Gie²¹, bahwa ujian pertama kalangan pemuda pejuang itu justru datang ketika mereka menjadi anggota DPR-GR atau kaum legislatif karena mereka menyuarakan partainya masing-masing yang ada di atasnya. Mereka terjerat dalam *vested interest*. Dalam hal ini KAMI tidak lagi dipimpin oleh mahasiswa atau kaum muda, tetapi oleh orang yang rata-rata berumur di atas 30 tahun yang mestinya tidak lagi berstatus mahasiswa tetapi adalah politikus.

Gerakan mahasiswa cenderung mendukung Suharto, khususnya dalam pembubaran PKI, tetapi nyaris berhenti karena sebenarnya gerakan mahasiswa yang awalnya adalah gerakan moral, secara tidak sadar telah diproteksi oleh kekuatan militer untuk kepentingan tertentu. Mahasiswa tergilas dalam paradigma militer, sedangkan mereka sendiri tidak sempat memikirkannya, sehingga gerakan

²¹ Muhamad Agus Syadat Hasibuan, 2008:61-53

mahasiswa 66 lebih bersifat ornamen atau emosional. Dan bahkan, gerakan mahasiswa merupakan kepanjangan dari suatu konflik yang sebelumnya telah terjadi, yaitu perpecahan ideologi, kemudian perpecahan dalam tubuh ABRI; sehingga tidak heran jika gerakan mahasiswa selalu dicurigai “ditunggangi”. Hal ini dibuktikan pada peristiwa Malari yang merupakan “perang bintang” atau konflik antar-jenderal di tubuh ABRI.

4) Pergerakan Mahasiswa Era Orde Baru (1966-1998)

Periode ini, mahasiswa kembali ke kampus, pergerakan mahasiswa bersifat *moral force*; Arief Budiman sebagai pencetus konsep ini menyatakan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh pamrih dengan kekuasaan dan tidak memiliki *vested interests*. Sepanjang 1968 sampai 1969 kondisi kampus dianggap tenang-tenang saja karena sedang menjalani “bulan madu” dengan pemerintahan. Pembangunan menampakkan hasil tetapi tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, malah menjamur nepotisme dan korupsi aparat pemerintah. Penguasa dihadapkan pada mempertahankan stabilitas politik atau menjaga hubungan dengan mahasiswa. Akibatnya, hubungan keduanya pecah, dan antara tahun 1970 sampai 1980 sering terjadi konflik. Peristiwa Malari adalah wujud dari perpecahan antara mahasiswa dengan penguasa orde baru, yang melemahkan KAMI.

Tahun 1970 aksi mahasiswa mulai marak, selain disebabkan oleh ketimpangan sosial, penambahan jumlah mahasiswa, tetapi fasilitas tidak bertambah. Aktivistis pada waktu itu ialah Victor D, Arief Budiman, Julius Usman membentuk “Mahasiswa Menggugat” dan diikuti dengan membentuk organisasi kemahasiswaan lainnya. Di Bogor diadakan pertemuan Dewan Mahasiswa untuk membentuk *National Unions of Students* (NUS) dan *World Association of Youth* (WAY), tetapi mahasiswa tidak berhasil mengambil kata sepakat terhadap pembentukan organisasi tersebut. Pada 22 Januari 1972, dibentuk Kelompok Cipayang yang merupakan gabungan HMI, GMNI, GMKI, dan PMKRI; dengan motif menjaga kebersamaan, solideritas, dan penyamaan persepsi tentang masalah-masalah nasional. Pada periode ini, pemerintah membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atas prakarsa Midian Sirait. KNPI merupakan organisasi ekstra-universitas sebagai kumpulan orang-orang yang mendukung

Suharto. Tidak sedikit organisasi kemahasiswaan (GPM, HMI, PMKRI, PMII) yang mendukung komite yang diketuai oleh Abdul Gafur ini. Namun organisasi intra-universitas secara independen tetap menyuarakan suatu kebenaran dan keadilan serta tetap peka pada persoalan yang dihadapi masyarakat dan negara. Adapun faktor penyebab gerakan mahasiswa periode ini ialah:

Pertama, penerapan strategi pembangunan orde baru yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. *Kedua*, banyak pejabat yang terlibat korupsi. *Ketiga*, hutang luar negeri Indonesia meningkat hanya disebabkan oleh perilaku asisten pribadi Presiden (Aspri) yaitu Ali Mortopo dan Soedjono Umardani. *Keempat*, terjadi pemborosan anggaran untuk proyek yang tidak mendesak, salah satunya, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). *Kelima*, terjadi berbagai bentuk rekayasa politik untuk melanggengkan pemerintahan orde baru. Tanggapan mahasiswa atas persoalan di atas dengan melaksanakan beberapa aktivitas, di antaranya; diskusi-diskusi tentang pembangunan dan politik di Indonesia oleh UI; membuat kelompok-kelompok *ad-hoc*, misalnya mahasiswa Jakarta dan Bandung membuat “Gerakan Penghemat”, “Gerakan Aksi Sehat”, dan “Gerakan Penyelamat Uang Rakyat” untuk memprotes proyek TMII.

Bulan Oktober 1973 dipimpin oleh DMUI, mahasiswa mengadakan aksi ke gedung MPR/DPR untuk menyampaikan “petisi 24 Oktober”, yang mengkritik kebijaksanaan pemerintah. Akhir 1973 sampai awal 1974, aksi mahasiswa membawa isu anti modal asing, anti para Aspri; dengan misalnya menolak kedatangan Menteri Kerjasama Belanda, Fronk ke Jakarta sebagai Ketua *Inter Gavermental Group on Indonesia* (IGGI), membakar boneka Soedjono Humardani dan Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Atas kondisi pergerakan mahasiswa yang dianggap telah ditunggangi oleh kekuatan anti Suharto, 11 Januari 1974 Presiden bersedia menerima delegasi Dewan Mahasiswa, tetapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. 12 Januari 1974, mahasiswa mengajak masyarakat untuk menyambut Tanaka dengan sebuah penolakan. 14 Januari 1974, mahasiswa berdemonstrasi di lapangan terbang Halim Perdanakusuma memprotes kedatangan Tanaka, hari berikutnya, mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran UI Salemba untuk menyusun kembali Tritura (Tritura Baru) yaitu turunkan harga, bubarkan asisten pribadi presiden, dan

ganyang korupsi. Kemudian mahasiswa bergerak ke Monumen Nasional, dalam perjalanan masa semakin bertambah dari berbagai kalangan. Mendekati Istana Negara, massa tidak terkontrol dan terjadilah kerusuhan, dengan membakar mobil, toko. Saat itulah muncul Jenderal Sumitro menenangkan, kemudian massa mahasiswa kembali ke Salemba. Namun sepanjang malam itu, kerusuhan tetap terjadi dan tidak terkontrol. 16 Januari 1974, Jenderal Sumitro dan tiga Aspri mengancam akan menggunakan kekerasan, malam harinya, Hariman Siregar “ditampilkan” di televisi untuk membacakan deklarasi DMUI yang intinya menentang kekerasan.

Dampak kerusuhan yang dinamakan peristiwa Malari itu dituduh oleh Ali Murtopo sebagai usaha makar yang dilakukan mahasiswa²². Peristiwa itu menelan korban hampir 1000 mobil, 144 gedung, 9 orang meninggal, dan 820 orang ditangkap, beberapa koran ditutup. Tokoh yang ditahan antara lain Rahman Tolleng, Hariman Siregar, Subandio Sastrosatomo, Prof. Sarbini Sumawinata, Adnan Buyung Nasution, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, H.J Princen. Pergerakan mahasiswa yang dilakukan sepanjang tahun 1974 untuk mengkritik pemerintah. *Pertama*; unjuk rasa menuntut Tritura Baru dengan, *kedua*; mengadakan diskusi-diskusi tentang pembangunan, *ketiga*; mendirikan organisasi, misalnya “Mahasiswa Menggugat”, “Komite Anti-Korupsi”, “kelompok Golongan Putih”, *keempat*; mengadakan dialog dengan Presiden Suharto (11 Januari 1974) tetapi tidak memuaskan, dan *kelima*; menerbitkan koran bernama “Mahasiswa Indonesia” di Bandung.

Pemerintah mengatasi pergerakan mahasiswa di tahun 1974, dengan cara, *pertama*; mengambil tindakan hukum pada elit mahasiswa, *kedua*; melumpuhkan mahasiswa dengan SK No. 28/U/1974 yaitu SK yang memberi kewenangan kepada pimpinan PT untuk mengontrol mahasiswa atau bentuk larangan mahasiswa beraktivitas di luar kampus, *ketiga*; melakukan beberapa perubahan di lembaga pemerintahan yaitu membubarkan Aspri dan Pangkopkamtib dijabat langsung oleh Presiden, *keempat*; menggeser skala prioritas trilogi pembangunan menjadi pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Kebijakan pemerintah ini tidak cukup untuk menghentikan langkah mahasiswa, misalnya, kepada Syarif Thayeb, tuntutan untuk mencabut SK-28 dan tidak membuat SK sejenis.

²² Suharsih, 2007: 83

Setelah itu, kegiatan mahasiswa menurun, akibat trauma pada peristiwa Malari, mahasiswa cenderung berkegiatan di bidang seni dan sosial, menghindari dari masalah politik. Dengan kembalinya mahasiswa ke kampus, suasana sudah dianggap kondusif. Tetapi, masih ada yang membuat galau pemerintah, yaitu adanya pengaruh mahasiswa Barat yang melawan dengan kebudayaan baru yang direstui oleh perdamaian, percintaan, kemerdekaan, sebagai semboyannya. Hal ini dapat berdampak negatif pada mahasiswa Indonesia dalam bentuk penyakit demoralisasi, narkoba, kebebasan sex, sadisme, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan tindakan pengamanan terhadap infiltrasi budaya ini, dilaksanakanlah penyelamatan rahaniah oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) di setiap provinsi. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan pemuda (mahasiswa) untuk menerima pelimpahan pimpinan. Salah satunya melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Komando Daerah Militer (Kodam) pada dosen Pendidikan Kewarganegaraan²³ yang dianggap strategis dalam membentuk sikap mahasiswa untuk siap menjadi pimpinan masa depan.

Pendidikan merupakan unsur penting dalam pembentukan moral, dan untuk memberi gairah pada mahasiswa, tahun 1974 Presiden Suharto mencetuskan gagasan untuk memberikan beasiswa melalui Yayasan Supersemar, bagi mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi serta harus bersifat Pancasilais sejati dan berkelakuan baik. Dana juga mengalir untuk pembangunan fasilitas mahasiswa, misalnya Gelanggang Mahasiswa. Semua ini dilatarbelakangi bahwa setiap kegiatan mahasiswa, hasilnya harus dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi sebagai wujud bakti kepada nusa dan bangsa.

Bahkan kegiatan Badan Koordinasi Kegiatan Perguruan Tinggi (BKKPT-DKI) disponsori oleh Pemda DKI untuk kegiatan kesenian dan keolahragaan. Keadaan seperti ini justru dikhawatirkan oleh Jenderal Sudomo yang khawatir mahasiswa kehilangan peran kontrol sosialnya. Apapun alasannya, memang sudah

²³ Dahulu Pendidikan Kewiraan, sejak tahun 2000 diganti menjadi Pendidikan kewarganegaraan. Sesuai dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, menjadi matakuliah wajib di PT. Sampai saat ini (2009) dosen Pendidikan Kewarganegaraan secara nasional dibina oleh Departemen Pertahanan, akhir 2008 telah dibentuk Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan seluruh Indonesia (ADPKn) sekarang diketuai oleh Drs. Warsito, S.H. M.M. dan berkantor di Jalan Sugiono 39 A Jakarta Timur. Sedangkan di tingkat daerah dibina oleh Kodam masing-masing, secara periodik (tahunan) dosen Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan Penataran dan Lokakarya. Sampai tahun 2003 pembekalan dosen Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sejak tahun 2003 sampai sekarang dilaksanakan oleh Dirjen Dikti.

dasarkan kritis, mahasiswa tidak berhenti bergerak, terutama rasa khawatir terhadap Pemilu 1977. Adanya indikasi kecurangan²⁴ sehingga mahasiswa ikut memantau jalannya Pemilu 1977, bahkan mahasiswa UNPAD mengundang PPP dan PDI untuk berdiskusi seputar kampanye, DM UI (Dipo Salam), ketua Majelis Tinggi Mahasiswa Ujung Pandang (Hamundu) juga memberikan dukungan pada PPP sebagai penyeimbang atas kekuatan Golkar.

Setelah itu, mahasiswa terlibat lagi dalam politik; mahasiswa memprotes pelaksanaan Pemilu 77 yang dianggapnya merugikan rasa keadilan. Mahasiswa mengeluarkan “Surat Terbuka untuk Bangsa” yang berisikan kritikan terhadap pelaksanaan Pemilu 77²⁵. Gerakan mahasiswa dalam memprotes Pemilu 77 ini juga dilakukan dalam bentuk unjuk rasa secara demonstratif, khususnya menyerang kepemimpinan nasional, yaitu menolak Suharto dicalonkan kembali sebagai presiden.

Setelah peristiwa Malari, pada saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Thayeb mengeluarkan SK-28/1974. Pada masa ini, gerakan mahasiswa bersifat mandiri walaupun secara diam-diam masih ada yang mendukung, misalnya Jenderal AH Nasution, Jenderal Kemal Idris, Jenderal HR Dharsono, Jenderal Ali Sadikin. Namun, mahasiswa tetap menyatakan gerakannya bersifat mandiri murni, walaupun ada pendapat bahwa mahasiswa tidak akan mempunyai kekuatan, kecuali bergandengan dengan kekuatan politik. Penetapan SK-28 menimbulkan kekisruhan, misalnya; di ITB; terjadi aksi pada acara serah terima jabatan Rektor ITB Prof. Dr. Dody Tisna Amidjaja kepada Prof. Dr. Iskandar Alisyahbana.

Di Jakarta; terjadi protes terhadap kenaikan angkutan umum, membuat Surat Terbuka kepada Presiden Suharto untuk menindak pelanggar Pemilu 1977. Di Bogor; DM/SM berhasil merumuskan memorandum bahwa DPR bukan satu-satunya saluran aspirasi rakyat, disampaikan kepada Adam Malik bersamaan dengan Pembukaan Sidang MPR, 1 Oktober 1977. Di Yogya dalam “Kelompok

²⁴ Kecurangan tersebut antara lain adanya intimidasi dari pihak Golkar (oleh militer) kepada rakyat, beberapa pegawai negeri yang dipindahkan tugasnya karena tidak memilih Golkar, ajang saling jejal antara kekuatan politik dengan isu-isu negatif (Edy, 2000:64).

²⁵ yaitu Pemilu tidak dilaksanakan dengan tidak jujur menurut ketentuan hukum yang mengundang perubahan secara inkonstitusional yang dapat mencelakakan bangsa, militer seolah hanya menjadi milik salah satu kontestan yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa yang sehat (Edy, 2000:77).

Sabtu” digelar isu kehidupan politik yang sentralistik, juga di Medan protes pengadaan guru, di Surabaya protes pengusuran pedagang kakilima. Sebelum DPR hasil Pemilu 77 belum terbentuk, DPR hasil Pemilu 72, dipimpin oleh Dr. Idham Chalid, telah membubarkan diri pada 8 September 1977, sehingga terjadi kekosongan parlemen sampai tanggal 1 Oktober 1977; dalam mengisi kekosongan itulah, mahasiswa membentuk DPRS melalui Maklumat September 1977, tertanggal 13 September 1977, gerakan ini ditumpas oleh Sudomo, selaku Pangkopkamtib, hasilnya beberapa mahasiswa ditangkap.

Pada fase ini, mahasiswa menemukan kembali titik temu untuk bersatu. DM se-Jakarta menjalin hubungan erat yang membentuk peta jaringan mahasiswa lokal yang solid. Pergerakan mahasiswa mulai berani menyerang pimpinan nasional, salah satunya, menolak Suharto menjadi presiden kembali dan mengajukan alternatif, yaitu Ali Sadikin dan Adnan Buyung Nasution sebagai presiden dan wakil presiden. Penolakan ini mengkristal pada pertemuan DM dan SM se-Indonesia di ITB yang menghasilkan “Ikrar Mahasiswa Indonesia” tanggal 28 Oktober 1977.

Selain menolak Suharto sebagai presiden, Ikrar Mahasiswa Indonesia mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu²⁶: *pertama*; di bidang politik, ada penyelewengan terhadap konstitusi negara, yaitu penyatuan pimpinan MPR/DPR sehingga sejajar dengan kedudukan presiden, Pemilu yang tidak jujur adil, langsung umum dan rahasia, militer yang hanya menjadi alat salah satu partai, *kedua*; di bidang ekonomi bahwa pasal 33 UUD 1945 belum dilaksanakan dengan murni dan konsekuen, semakin lebarnya jurang antara si miskin dan si kaya, belum seimbang antara pembangunan dan lapangan kerja, semakin merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak adanya kesadaran antara utang luar negeri dan kemampuan bayar, *ketiga*; di bidang sosial budaya, penonjolan budaya Jawa dalam forum nasional, belum ada pemerataan dalam pendidikan, ada pembatasan terhadap kebebasan mimbar akademis, adanya isu KNPI berperan juga dalam menyusun GBHN dengan mengabaikan komponen pemuda lainnya, *keempat*; di bidang kepemimpinan nasional dan daerah yaitu adanya gejala mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara.

²⁶ Edy, 2000: 103-105

Di samping rekomendasi di atas, mahasiswa bertekad untuk menyuarkan aspirasinya dengan aksi “turun ke jalan”, sebagai bukti, pada tanggal 10 November 1977 mahasiswa se-Jakarta untuk pertama kalinya setelah Malari, mengadakan aksi *long march* yang diikuti oleh ribuan mahasiswa, dari kampus IKIP Jakarta Rawamangun ke Salemba UI. Aksi bertema “Padamu Pahlawan Kami Mengadu” dan membawa poster bertuliskan “Kembalikan ABRI kepada rakyat, kami menganggap bahwa ABRI telah diperalat Suharto”, ini dilepas oleh Rektor IKIP, Prof Dr. Winarno Surahmad. Di Bandung juga dilakukan hal yang sama, menuju Taman Pahlawan Cikutra. Sampai bulan Desember 1977 aksi mahasiswa, walaupun tidak menimbulkan kerusuhan, semakin merata di seluruh daerah. Akibatnya, situasi politik semakin memanas karena yang diserang adalah Presiden.

Kondisi ini membuat Presiden Suharto memanggil beberapa menteri agar mengendalikan kegiatan mahasiswa yang sudah dianggapnya mencoreng wibawa pemerintah. Di balik itu, para elit ABRI selama tiga hari pertemuan (13-15 Desember 1977) menyepakati memberikan dukungan kepada Suharto dan meminta kritik-kritik dari masyarakat disalurkan melalui jalur konstitusional serta akan mengambil tindakan tegas pada mahasiswa yang mengancam menggeser kekuasaan nasional. DPRD Jawa Barat juga mendukung Suharto dengan usul agar anggota MPR dari Jawa Barat untuk memilih kembali Suharto sebagai presiden pada SI MPR 1978. Inisiatif DPRD Jawa Barat ini ternyata diprotes keras oleh mahasiswa sebagai “menyilat”. Tidak takut dicituk, mahasiswa mengadakan diskusi dengan tema *Perlunya Pembatasan Masa Jabatan Presiden*. Dan di penghujung tahun 1977 melakukan renungan akhir tahun yang puncaknya adalah pembakaran bendera hitam di kampus Universitas Atmajaya, sebagai lambang penghancuran sikap kebatilan.

Sebenarnya, pergerakan mahasiswa di era ini lebih banyak dilakukan di dalam kampus (dampak SK-28), walaupun begitu pergerakan yang tidak mempunyai wadah pemersatu se-Indonesia ini cukup signifikan memberikan kritik terhadap pemerintah. Kegiatan mahasiswa ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: *Pertama*, unjuk rasa di dalam kampus dengan pembacaan puisi, aksi bebas, mengeluarkan petisi dan pernyataan sikap. *Kedua*, pertemuan mahasiswa seperti di ITB (24-27 Oktober 1977), di kampus IPB, Bogor (25-26

Desember 1977), pertemuan DM/SM se-Jakarta di kampus UI (5 Januari 1978), dan Pertemuan di Graha Wisata Gelanggang Mahasiswa Kuningan, Jakarta (6 Januari 1978). *Ketiga*, pertemuan dengan pihak penguasa, misalnya, 10 Oktober 1977 sekitar 13 DM/SM se-Surabaya mengadakan pertemuan dengan Ketua MPR/DPR hasil Pemilu 1977, Adam Malik, dan pada 7 Januari 1978 pertemuan DM/SM se-Indonesia dengan Adam Malik, 18 Januari 1978 lima orang wakil DM/SM menerobos kediaman Presiden untuk menyerahkan surat agar Suharto menolak dicalonkan menjadi presiden RI. *Keempat*, pembuatan dokumen gerakan mahasiswa, misalnya, 15 Januari 1978, DM UI membuat dokumen berjudul “Landasan Perjuangan Mahasiswa dan Tekad Kita”, 16 Januari 1978 DM ITB mengeluarkan “Buku Putih Perjuangan Mahasiswa”. *Kelima*, membentuk komite-komite aksi, seperti Gerakan Anti Kebodohan (GAK) oleh mahasiswa ITB.

Memasuki tahun 1978, pergerakan mahasiswa hubungan antar DM di hampir seluruh PT di Indonesia semakin kompak. Pergerakan ini, khususnya meminta pertanggungjawaban Presiden. Pergerakan ini dipandang cenderung anarkis yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat luas. Bahkan Jenderal Sudomo (Staf Komando) menyatakan bahwa mahasiswa (DM) telah melawan hukum dan konstitusi dengan Ikrar Mahasiswanya. Suharto membolehkan adanya kritik tetapi jangan sampai membahayakan kehidupan Pancasila dan Konstitusi.

Untuk menjaga pergerakan mahasiswa semakin melebar, maka dikeluarkan beberapa surat keputusan yang intinya membatasi aktivitas mahasiswa. Surat keputusan tersebut ialah; *Pertama*, SK Kopkamtib (21 Januari 1978) tentang pembubaran DM dan pengambilalihan kampus oleh militer. *Kedua*; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu Daoed Yoesoef), mengeluarkan instruksi Nomor 1/U/1978 dan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembubaran DM dan pembatasan aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa dibatasi hanya di bidang kesejahteraan, rekreasi, dan akademik. *Ketiga*, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). *Keempat*, SK Dirjen Dikti Nomor 002/DK/Inst/1978 yang menempatkan semua aktivitas mahasiswa di bawah Pembantu Rektor III dibantu Dekan III. *Kelima*, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/U/1979 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Mahasiswa (BKK). *Keenam*,

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/U/1979 tentang Sistem Kredit Semester (SKS).

Dengan NKK, kampus dianggap sudah tidak normal sehingga perlu ditata kehidupan kampus secara mendasar, fungsional, dan bertahap. BKK adalah lembaga non-struktural yang membantu rektor merencanakan kegiatan mahasiswa sehingga semua aktivitas mahasiswa diawasi oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi. Dengan SKS, mahasiswa hanya memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan berbagai kegiatan di luar belajar. Semua kebijakan ini dilaksanakan agar lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga pembelajaran dan lembaga pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan negara. Semua kegiatan harus atas izin rektor dan diawasi oleh pihak keamanan sehingga membatasi aktivitas mahasiswa.

Akibatnya, berpengaruh pada ketersediaan (*iron stock*) kader-kader pimpinan dari kalangan mahasiswa, karena pimpinan mahasiswa dilaksanakan dengan penunjukan bukan atas pemilihan dari suara mahasiswa sehingga dukungan masyarakat kepada mahasiswa menjadi berkurang, bahkan sampai sekarang. Pada periode ini, unsur militer masuk kampus melalui Resimen Mahasiswa (Menwa) yang didukung oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan Keamanan. Selain Menwa, untuk menstabilkan kehidupan kampus, dilaksanakan Pelatihan Pancasila, Pengenalan Kehidupan Kampus, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi matakuliah wajib.

Pergerakan mahasiswa pada periode 1980 sering disebut pasca NKK/BKK, relatif tenang, mahasiswa hanya berkulat di kampus untuk menyelesaikan target kuliah untuk cepat lulus. Pemberlakuan NKK/BKK membuat mahasiswa tidak mempunyai wadah pemersatu nasional, walaupun ada beberapa organisasi tingkat nasional ekstra-kampus, seperti HMI, PMII, GMNI, GMKI, tetapi lembaga ini dianggap tangan kanan pemerintah. Tahun 1990 Fuad Hasan mencabut kebijakan NKK/BKK dan digantikan dengan SK Menteri P dan K Nomor 0457/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). SK ini menetapkan antara lain organisasi kemahasiswaan intra-kampus yang diakui ialah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Senat Mahasiswa

Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). PUOK dianggap sebagai bentuk baru terhadap “pembungkaman mahasiswa” di bidang politik.

Selama periode ini, banyak aktivis ditangkap antara lain Bambang Isti Nugroho, Bonar Tigor Naipopos, dan Bambang Subono karena mengedarkan buku karangan Pramoedya Ananta Toer. Heri Akhmadi, Agus Salim, Lukman Hakim, Yeni Rosa Damayanti, Nuku Sulaiman, Andi Syahputra, Sri Bintang Pamungkas ditangkap karena menghina Presiden. Juga terjadi pembredelan pers kampus maupun pers nasional yang melawan kebijakan pemerintah waktu itu, bahkan ada sekitar 2.000 buku yang dilarang terbit. Pencekalan juga terjadi kepada tokoh seperti Pramoedya Ananta Toer, Emha Ainun Najib, Arief Budiman untuk berbicara di depan umum.

Dengan batasan tersebut, mahasiswa menemukan format baru untuk menyalurkan aspirasinya yaitu melalui beberapa kegiatan, yaitu: *Pertama*, membentuk kelompok-kelompok studi, misalnya di Jakarta terdapat Kelompok Studi Proklamasi, Lingkaran Studi Indonesia, Kelompok Studi Relata, di Bandung ada Kelompok Studi Dago Pojok, di Bogor ada Kelompok Studi Sosionomica, di Salatiga ada Kelompok Studi 17 November, di Yogyakarta ada Kelompok Studi Lingkungan dan Forum Studi Sosial Demokrasi, di Ujung Pandang ada Kelompok Studi Indonesia Raya, Kelompok Studi Wawasan Nusantara, Kelompok Studi Bulukunyi. Kelompok studi ini berperan dalam membangun sikap kritis terhadap masalah-masalah sosial dan politik dan sebagai pusat penyebaran informasi kritis antarmahasiswa. Selain itu, kelompok studi juga membahas masalah-masalah ilmiah, misalnya mendiskusikan karya pemikir seperti Karl Maxt, Paolo Freire, Ovan Illich, Jurgen Habermas, dan Michael Foucault.

Kedua, Pers Mahasiswa, yang berfungsi menjembatani antar-mahasiswa dan masyarakat dalam masalah-masalah demokratisasi, HAM, politik, ekonomi, sosial budaya. *Ketiga*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagai wadah tatanan praktis dalam mengimplementasikan tanggung jawab mahasiswa kepada masyarakat dengan melakukan advokasi secara radikal serta mengorganisasi aksi-aksi protes. *Keempat*, Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung, Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta, Kelompok Mahasiswa Jakarta. Badan-badan ini didirikan karena adanya pengawasan yang ketat terhadap sepak-terjang LSM sehingga komite bekerja secara sporadis, temporer, dan bersifat lokal; di antaranya

menangani masalah pertanahan, lingkungan hidup, korupsi, HAM, dan politik lokal; misalnya penyelesaian masalah tanah rakyat di Kedung Ombo, Kacapiring, Badega; kasus korupsi Bapindo; penghapusan kupon Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Advokasi pada kalangan rakyat ini adalah upaya mahasiswa untuk mendapat dukungan dan menjadi awal kemunculan organisasi masa.

Organisasi mahasiswa yang penting ialah Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang dideklarasikan Agustus 1994 dan beraliansi pada Partai Rakyat Demokrat (PRD). SMID merupakan organisasi yang memobilisasi kalangan bawah ini paling sering mengkritik Suharto. Periode 1994 merupakan masa keterbukaan politik dan perlawanan rakyat, ditandai dengan: *pertama*, munculnya sentimen anti Suharto; *kedua*, munculnya perlawanan rakyat; ketiga, muncul pemaksaan keterbukaan dalam isu perburuhan dan tani; *keempat*, unsur demokratis dan kerakyatan menjadi isu nasional. Di dalam kampus, mulai tahun 1995 mulai dirintis berdirinya DM-DM; pergerakan mahasiswa tahun 1980-1990-an merupakan embrio dari pergerakan mahasiswa di tahun 1998 yang tidak bisa diputus oleh kebijakan pemerintah.

Pergerakan mahasiswa berkembang cepat, salah satunya merupakan dampak dari pengembangan sikap kritis yang dihasilkan dari diskusi kritis dan ilmiah kelompok-kelompok studi mahasiswa. Beberapa organisasi mahasiswa non-formal kampus hadir di awal tahun 1998, sebagai penolakan terhadap penerapan PUOK, misalnya Dewan Mahasiswa UGM, Keluarga Besar UI, Komite Pergerakan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (KPMURI-UNPAD), Solidaritas Mahasiswa Jakarta (SMJ), Pusat Informasi Jaringan Aksi Reformasi (Pijar). Di luar kampus, bermunculan organisasi misalnya Oposisi Indonesia, Majelis Rakyat Indonesia (MARI), dan beberapa LSM.

Tetapi, organisasi-organisasi ini mendapat perlawanan dari pemerintah dengan penangkapan aktivis yang dianggap komunis dan dalang kerusuhan 27 Juli 1996²⁷, khususnya PRD. Penanganan pemerintah yang dianggap melanggar HAM dan demokrasi dalam peristiwa ini, menimbulkan solidaritas dari kalangan internasional. Puncaknya pada 28 Oktober 1996 terjadi aksi yang dinamai Hari

²⁷ Pendudukan kantor PDI (Megawati) di Jalan Diponegoro Jakarta yang menyulut kerusuhan besar di Jakarta, banyak mobil, gedung-gedung pemerintah, *show room*, dan bank dibakar massa. Dalam peristiwa ini beberapa tokoh mahasiswa ditangkap.

Protes Internasional untuk HAM dan Demokrasi²⁸. Aksi ini juga dilaksanakan di beberapa kota di luar negeri, misalnya aksi piket dan pidati di Newcastle dan Hobart, tenda keprihatinan di Nederland dan di Amsterdam, mogok makan di Sidney; Melbourne; dan Adelaide, petisi mendukung Budiman Sudjatmiko (tokoh PRD), Dita Sari (aktivis buruh), dan Muchtar Pahpahan (Tokoh Partai Buruh) di Australia, bahkan di India oleh wakil Asosiasi Mahasiswa Seluruh India dan Dewan Serikat Buruh India, di San Fransisco Amerika Serikat), Stockholmdan Gutenberg (Swedia), Kanada dan Perancis.

Aksi ini mendukung gerakan demokrasi di Indonesia, hapus dwifungsi ABRI, cabut 5 UU politik 1985 yang anti demokrasi, stop kerja sama militer dengan Indonesia, dan boikot Suharto. Peristiwa 27 Juli 1996 yang nampaknya memukul gerakan pro-demokrasi malah menimbulkan radikalisasi di kalangan masyarakat, memasuki tahun 1997 terjadi 154 demonstrasi yang mengangkat isu internasional, nasional, daerah. Beberapa mahasiswa yang tersisa (sebagian besar dipenjara) mengambil strategi dan mengorganisasi kampus dengan mengadakan demonstrasi dengan isu-isu kampus maupun situasi nasional; terutama di Yogyakarta yang mengangkat isu golongan putih (golput) dalam pemilu 1997. Ketika krisis ekonomi terjadi tahun 1997 terjadi ketidakpuasan pada pemerintah orde baru dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa sehingga baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mahasiswa menolak Suharto untuk dicalonkan sebagai presiden 1998-2003. Pada puncaknya pergerakan mahasiswa terjadi pada Mei 1998 yang berhasil menurunkan Suharto mundur sebagai presiden.

Momentum bersejarah pergerakan mahasiswa tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi mahasiswa sekarang, namun nampaknya pergerakan mahasiswa justru banyak muncul dalam bentuk kerusuhan. Ketiadaan “musuh bersama” seperti pada orde baru membuat mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingannya masing-masing. Bahkan tidak sedikit pergerakan mahasiswa sekarang terjebak menjadi alat politik bagi kepentingan tertentu²⁹, dan tidak sedikit pula mahasiswa yang tidak lagi peduli dengan jalannya reformasi.

²⁸ Suharsih, 2007: 96-97

²⁹ Seperti keikursertaan mahasiswa Universitas Sisingamangaradja XII Medan pada aksi demonstrasi yang menuntut pemekaran Provinsi Tapanuli pada 3 Februari 2009 yang menelan korban Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat meninggal dunia. Keikutsertaan mahasiswa dikoordinir oleh Pembantu Rektor III (bidang kemahasiswaan) yaitu Rudolf Marpaung dan setiap mahasiswa dibayar Rp 25.000 (Kompas, 4 Februari 2009)

Mereka lebih asyik dengan kebutuhan individualnya, yaitu belajar hanya mengejar cita-cita menjadi profesional agar mudah mendapat pekerjaan. Apalagi, sekarang biaya kuliah tinggi sehingga tuntutan agar cepat lulus, membuat mahasiswa fokus terhadap kuliahnya sehingga melupakan sisi-sisi sosial yang berada di jalur non-kuliah. Padahal, dari pergerakan mahasiswa akan lahir tokoh-tokoh yang menjadi pimpinan bangsa³⁰, hasilnya, regenerasi pimpinan di Indonesia sekarang mengalami kelambatan atau bahkan kemandekan, sehingga tidak nampak pimpinan yang mumpuni dari kalangan muda, khususnya mahasiswa.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mengajukan tesis pada Program Kajian Strategik Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia; berjudul *Pengaruh Nasionalisme dan Perubahan Sosial Terhadap Pergerakan Mahasiswa di Era Reformasi (Studi Kasus di Universitas Indonesia)*. Penulis memilih istilah *pergerakan mahasiswa* (bukan *gerakan mahasiswa*, sebagai umumnya dinamakan demikian) karena pengertian *pergerakan* ialah kebangkitan untuk memperjuangkan atau perbaikan, sedangkan *gerakan* berarti kegiatan di lapangan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan saran dalam strategi pembangunan mental bangsa/*national and character building* sehingga peran pergerakan mahasiswa dapat ditingkatkan dalam membangun ketahanan nasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

- 1) Pergerakan mahasiswa yang menggunakan strategi otot dalam perjuangan tidak akan pernah berhasil terbukti dengan kekalahan perlawanan fisik dan sporadis yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, Pattimura, Pangeran Diponegoro, dan Sisingamangaradja pada abad 17, 18, dan 19.
- 2) Pergerakan mahasiswa merupakan bentuk nasionalisme pada mahasiswa yang jika bangsa dan negaranya dilecehkan oleh pihak lain, akan beraksi untuk menunjukkan kemarahan atas ketersinggungannya. Pergerakan mahasiswa juga merupakan respon dari perubahan sosial dan juga menghasilkan perubahan sosial.

³⁰ Kompas, 2008

- 3) Pergerakan mahasiswa yang berhasil mencapai tujuan hingga Indonesia merdeka ialah yang strategi otak/intelektual, dibuktikan dengan sejak gerakan Budi Utomo sampai Indonesia merdeka hanya memerlukan waktu 33 tahun, waktu yang sangat singkat bagi perjuangan kemerdekaan suatu negara.
- 4) Pergerakan mahasiswa mengikuti perkembangan perjuangan Indonesia, yaitu periode pergerakan nasional, mahasiswa bersatu untuk membangun pondasi bangsa Indonesia; periode orde lama dan orde baru, mahasiswa berperan dalam melawan kediktatoran Sukarno yang kemudian membuka jalan bagi orde baru. Mahasiswa yang awalnya sebagai pengawal orde baru, justru menjadi “lawan” bagi pemerintah orde baru, setelah tahun 1973 dan peristiwa Malari dan gerakan mahasiswa 1978, yang menelurkan Ikrar Mahasiswa Indonesia sebagai wujud protes terhadap kebijakan pemerintah, mahasiswa hanya boleh belajar dan diatur oleh pemerintah melalui program NKK dan BKK;
- 5) Pergerakan tahun 1998, yang melahirkan era reformasi, mahasiswa melaksanakan gerakan intelektual melalui diskusi-diskusi ilmiah di kampus dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng, hasil dari forum diskusi ini, didukung oleh situasi ekonomi, sosial, dan politik waktu itu, lahirlah keberanian menyuarakan kebenaran melalui aksi lapangan dalam bentuk unjuk rasa. Unjuk rasa yang semula dilakukan secara kecil-kecilan dan hanya di daerah-daerah, berkembang menjadi gerakan yang besar dan nasional, yang pada puncaknya menduduki “Senayan” dengan tuntutan Presiden Suharto turun.
- 6) Peran pergerakan mahasiswa pasca era reformasi sampai sekarang dihadapkan pada tantangan globalisasi, salah satunya ialah kapitalisme. Hal ini membuat mahasiswa cenderung belajar mengejar cita-cita menjadi profesional agar mudah mendapat pekerjaan, sehingga tidak memperhatikan sisi-sisi sosial yang berada di jalur non-kuliah, yang justru menjadi sifat dasar seorang mahasiswa dan menjadi pengasah potensi menjadi pemimpin bangsa dan negara .
- 7) Nasionalisme mahasiswa semakin lama semakin menurun karena pengaruh globalisasi dalam hal ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan. Dalam hal ini mahasiswa dijajah oleh materialisme,

hedonisme, konsumtivisme, fatalisme, clauvinisme. Akibatnya, kepedulian terhadap permasalahan kebangsaan cenderung menurun.

- 8) Indonesia saat ini belum mempunyai rancangan strategi pembangunan mental bangsa/*national and character building* pada mahasiswa selain matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), yang ternyata belum mampu diharapkan menjadi pola pembangunan kepribadian bangsa Indonesia, bahkan matakuliah ini dianggap kuno dan doktriner.
- 9) Pergerakan mahasiswa tidak akan pernah mati sampai kapan pun. karena mahasiswa mempunyai sifat dasar memiliki intelektual dan kemudaan yang cenderung diimplementasikan dalam anti kemapanan sebagai awal dari perubahan sosial.

1.3 Perumusan Masalah

Pada periode perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan, peran pergerakan mahasiswa dalam Ketahanan Nasional Indonesia tidak diragukan lagi, dengan lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bahkan mahasiswa yang membidani lahirnya orde baru. Namun peran pergerakan mahasiswa ini berkurang atau tepatnya “dibungkam” oleh suasana politik orde baru; perlawanan mahasiswa selalu dipatahkan dengan pendekatan keamanan, mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis dan harus kembali ke kampus dengan program NKK/BKK. Walaupun dalam keterbungkaman selama orde baru, mahasiswa gerah melihat kekurangan dan kepincangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mahasiswa berontak hingga lahir reformasi yang mampu mengubah kemapanan pemerintah orde baru selama ini.

Peran mahasiswa dalam melahirkan orde reformasi diakui sangat herois yang menjadikan status *agent of change* atau agen perubahan tetap mengemuka dan diakui kebenarannya. Namun, setelah sepuluh tahun berlalu, nampaknya pergerakan mahasiswa kurang terlihat eksistensinya sebagai *pressure group* atau grup penekan. Apakah mahasiswa sekarang kurang kritis? atau ada pergerakan dalam bentuknya yang lebih tidak radikal, yang tujuan akhirnya adalah ingin meningkatkan dan menyempurnakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Padahal sifat mahasiswa tidak akan pernah hilang. Jadi permasalahan

dalam penelitian ini ialah, pergerakan mahasiswa dilahirkan oleh nasionalisme mahasiswa dan perubahan sosial.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan:

- 1) Bagaimana nasionalisme mahasiswa dan perubahan sosial dalam pergerakan mahasiswa di era reformasi?
- 2) Bagaimana pengaruh nasionalisme mahasiswa dan perubahan sosial terhadap pergerakan mahasiswa di era reformasi?
- 3) Bagaimana peran pergerakan mahasiswa di era reformasi dalam perspektif ketahanan nasional Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

- 1) Mengetahui nasionalisme mahasiswa dan perubahan sosial dalam pergerakan mahasiswa di era reformasi?
- 2) Mengetahui pengaruh nasionalisme mahasiswa dan perubahan sosial terhadap pergerakan mahasiswa di era reformasi?
- 3) Mengetahui peran pergerakan mahasiswa di era reformasi dalam perspektif ketahanan nasional Indonesia?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan mental bangsa, khususnya bagi mahasiswa dan pemangku pendidikan, serta pemangku kepentingan lain. Pembangunan mental bangsa yang sesuai dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masa kini dan masa yang akan datang dengan tidak melupakan masa lalu, sehingga ketahanan nasional Indonesia tetap tangguh. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada mahasiswa, PT, kementerian kepemudaan, dan pihak keamanan tentang strategi membentuk mental mahasiswa yang terpelajar dalam setiap perjuangan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam koridor perjuangan reformasi sehingga mampu berperan dalam meningkatkan ketahanan nasional.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Identifikasi Masalah
- 1.3 Perumusan Masalah
- 1.4 Pertanyaan Penelitian
- 1.5 Tujuan Penelitian
- 1.6 Manfaat Penelitian
- 1.7 Sistematika Penulisan

Bab II : KAJIAN TEORI

- 2.1 Nasionalisme Mahasiswa
- 2.2 Perubahan Sosial
- 2.3 Pergerakan Mahasiswa
- 2.4 Ketahanan Nasional

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

- 4.1 Nasionalisme Mahasiswa pada Pergerakan Mahasiswa
- 4.2 Perubahan Sosial pada Pergerakan Mahasiswa
- 4.3 Pengaruh Nasionalisme Mahasiswa dan Perubahan Sosial terhadap Pergerakan Mahasiswa
- 4.4 Peran Pergerakan Mahasiswa Era Reformasi dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia
- 4.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Bab V : PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran